

PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Laporan Penelitian



Oleh

Dosen : Dini Permanasari
Mahasiswa : Muhammad Abdul Fatah (23200152)
: Fathimah Zahra Hasyim (23200209)
: Sopian (23200307)
: Nurhikmah (23200254)

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DEPOK
2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN DOSEN BERSAMA MAHASISWA

1. Judul : Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Kualitas Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat
2. Ketua Pelaksana
Nama : Dini Permana Sari
Status : Dosen Tetap
Prodi : Program Pascasarjana (S2)
Magister Pendidikan Agama Islam
Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Depok
3. Anggota : Muhammad Abdul Fatah (23200152)
Fathimah Zahra Hasyim (23200209)
Sopian (23200307)
Nurhikmah (23200254)
4. Pelaksanaan : September-Oktober 2023
5. Biaya : Rp. 8.000.000,-
(Delapan Juta Rupiah)
6. Sumber : Anggaran Penelitian Institut Agama Islam Depok
Tahun 2023-2024

Depok, 13 Desember 2023

Ketua Pelaksana

Ketua Lppm

Institut Agama Islam Depok



Dini Permanasari



Dr. Syarif, M., Mm.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini yang berjudul **"PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA BARAT"** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui kajian tafsir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan Islam, baik secara teori maupun praktik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Ketua STAI Al Karimiyah atas dukungan fasilitas dan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan penelitian ini.
2. Kaprodi S2 MPAI STAI Al Karimiyah atas dorongan dan arahnya selama kegiatan berlangsung.
3. Para mahasiswa peserta penelitian yang telah bekerja keras dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pengembangan pendidikan Islam.

Depok, Desember 2023
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Kebijakan Pendidikan.....	7
2. Kualitas Pendidikan.....	15
3. Hubungan Kebijakan dan Kualitas Pendidikan.....	23
B. Penelitian Relevan Terdahulu	25
C. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian	26
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Deskripsi Data	31
2. Analisis Pengaruh Kebijakan	34
B. Pembahasan.....	37
1. Interpretasi Hasil Penelitian	37
2. Implikasi Pengembangan.....	38
C. Kesimpulan dan Saran.....	39
1. Kesimpulan.....	39
2. Saran dan Rekomendasi	39
REFERENSI	41
PENGUNAAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam memberikan kontribusi besar dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual yang kokoh (Syamsuddin, 2018).

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter peserta didik. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa (Suhendi, 2019).

Pendidikan Islam di Indonesia juga memiliki dimensi yang lebih luas, yakni sebagai upaya untuk menjaga keberagaman agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Melalui pendidikan Islam, peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan, memahami hakikat kehidupan sosial, serta mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (Sari, 2020).

Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengutamakan kualitas dalam setiap aspek penyelenggaraannya. Pembentukan karakter melalui pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada teori yang diajarkan, tetapi juga pada praktik kehidupan yang dijalani oleh peserta didik dan lingkungan di sekitarnya. Aspek ini perlu mendapat perhatian serius untuk menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan landasan moral yang kuat (Hamid, 2021).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia adalah bagaimana mengakomodasi perkembangan zaman yang sangat cepat, terutama dalam hal teknologi dan globalisasi. Di sisi lain, pendidikan Islam harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang menjadi panduan hidup bagi umat Muslim. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai

agama dengan teknologi dan perkembangan zaman menjadi hal yang sangat penting (Rochman, 2017).

Pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mentransformasikan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab. Generasi yang terlahir dari pendidikan Islam diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya yang berkembang di dunia modern (Suhendi, 2019).

Implementasi pendidikan Islam yang efektif akan menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar dalam hal akademik, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan dan penuh empati terhadap sesama. Di sinilah peran pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Syamsuddin, 2018).

Dalam konteks nasional, pendidikan Islam turut berperan dalam memperkuat karakter bangsa Indonesia, yang dikenal dengan semangat gotong royong, toleransi, dan kedamaian. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang mampu menciptakan individu-individu yang lebih empatik dan peduli terhadap kepentingan umum (Sari, 2020).

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang merata dan sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga mencakup pembentukan karakter dan identitas yang kuat bagi setiap warga negara Indonesia (Rochman, 2017).

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pendidikan Islam perlu diperbaharui agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam dalam era digital ini, kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan Islam dengan memanfaatkan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Hamid, 2021).

Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan dan dinamika pendidikan Islam yang cukup kompleks mengingat jumlah penduduk yang besar dan keberagaman

etnis serta agama yang ada. Sebagai provinsi dengan mayoritas Muslim, pendidikan Islam di Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan kompeten dalam berbagai bidang (Jamaludin, 2019).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan Islam di tingkat sekolah menengah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, merata, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Syamsuddin, 2018).

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi peserta didik dalam memahami ajaran agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pembelajaran agama dengan pembentukan karakter peserta didik (Sari, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam bidang pendidikan Islam. Program pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan Islam terus digalakkan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat proses pembelajaran yang tidak hanya berbasis pada teori, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa (Suhendi, 2019).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memfokuskan perhatian pada pengembangan fasilitas pendidikan Islam, baik di sekolah-sekolah negeri maupun di lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren. Fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung kualitas pendidikan Islam di daerah tersebut (Jamaludin, 2019).

Salah satu program unggulan dari kebijakan pendidikan Islam di Jawa Barat adalah penyelenggaraan program pendidikan berbasis pesantren. Pesantren

memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan ajaran agama dan pembentukan karakter. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan Islam yang berkualitas (Syamsuddin, 2018).

Kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat juga mencakup pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, kurikulum pendidikan Islam di Jawa Barat berusaha untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien (Rochman, 2017).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan tinggi, masyarakat, dan sektor swasta, dalam rangka memperkuat pendidikan Islam. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas di provinsi ini (Sari, 2020).

Dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan Islam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan berupa dana hibah untuk pengembangan fasilitas pendidikan, seperti renovasi gedung, pengadaan alat belajar, dan penyediaan buku-buku agama. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam di sekolah-sekolah dan pesantren di Jawa Barat (Suhendi, 2019).

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam. Salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tinggi dalam bidang pendidikan Islam, serta ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan (Jamaludin, 2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan upaya yang tepat, kualitas pendidikan Islam di Provinsi Jawa

Barat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter dan kecerdasan peserta didik (Sari, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus terus memperbaharui kebijakan pendidikan Islam agar dapat menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus tetap relevan dan memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik, sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks (Syamsuddin, 2018).

Dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan, diharapkan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat dapat berkembang dengan baik dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi tersebut. Kualitas pendidikan Islam yang baik akan memberikan dampak positif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan (Suhendi, 2019).

B. Rumusan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah:
 - a. Menilai dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap hasil belajar peserta didik di tingkat sekolah menengah di Provinsi Jawa Barat.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kebijakan pendidikan Islam, terutama dalam konteks implementasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat.

Menambah wawasan dan perspektif baru mengenai pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Memberikan masukan kepada praktisi pendidikan dan pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui implementasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

BAB II KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Pendidikan

a. Definisi dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai seperangkat keputusan atau aturan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur, mengarahkan, dan memfasilitasi sistem pendidikan yang ada dalam suatu negara atau daerah. Kebijakan ini memiliki tujuan yang luas, mulai dari meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran, hingga menciptakan keadilan dalam penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Tilaar (2010), kebijakan pendidikan adalah langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai bagian dari sistem sosial, kebijakan pendidikan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan sistem pendidikan yang tersedia. Di Indonesia, kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga mencakup aspek moral dan karakter yang sangat penting dalam pengembangan generasi muda. Hal ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Kebijakan pendidikan Indonesia berupaya untuk menjawab tantangan globalisasi, dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menyiapkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin kompleks. (Tilaar, 2010).

b. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa penjajahan, terus berkembang pasca-kemerdekaan, dan terus mengalami perubahan hingga saat ini. Pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003. Kebijakan pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada umat Islam, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi.

Pada tingkat kebijakan, pendidikan Islam di Indonesia berperan penting dalam menjaga identitas dan karakter bangsa, terutama dalam konteks pluralitas agama dan budaya. Kebijakan pendidikan Islam diatur oleh berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan pelaksanaan Kurikulum 2013, yang mencakup pendidikan agama Islam sebagai bagian dari kurikulum wajib di sekolah. Kurikulum ini menekankan pada pengajaran agama yang holistik, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang memiliki integritas moral, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman, terutama dalam dunia yang semakin berkembang pesat dalam hal teknologi dan informasi.

Pendidikan Islam di Indonesia juga berupaya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, seperti radikalisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya mengedepankan pengajaran agama, tetapi juga pengembangan karakter dan etika. Salah satu contoh kebijakan yang sangat relevan adalah penguatan pendidikan agama Islam melalui madrasah dan pondok pesantren yang ada

di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Pendidikan agama Islam di Indonesia diharapkan dapat berperan dalam membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur dan mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk bagaimana agar kebijakan yang diterapkan dapat merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki tantangan untuk menjamin bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya diterapkan dengan baik di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan Islam bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang berkembang menjadi sangat penting. Salah satu bentuk kebijakan yang diambil adalah melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang akses pendidikannya terbatas. Program seperti ini membantu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan dan memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam juga memfokuskan perhatian pada kualitas pendidikan yang disampaikan oleh para pendidik. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan Islam melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi profesi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengajaran yang diberikan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pengetahuan teori, tetapi juga dapat membekali mereka dengan keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kebijakan ini, kualitas pendidikan agama di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebijakan pendidikan Islam juga semakin mendekatkan pendidikan agama dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, kebijakan pemerintah berusaha menjembatani kesenjangan antara pendidikan agama dan teknologi dengan mengintegrasikan pelajaran agama dalam sistem pendidikan berbasis teknologi. Di beberapa sekolah dan madrasah di Provinsi Jawa Barat, misalnya, telah diterapkan metode pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan ajaran agama Islam. Hal ini tidak hanya mempermudah siswa dalam mempelajari materi agama, tetapi juga memperkenalkan mereka pada teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam di dunia maya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya mengatur pengajaran agama di sekolah, tetapi juga membentuk karakter siswa yang dapat menghadapi tantangan dunia digital.

Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah integrasi pendidikan agama Islam dengan pendidikan karakter. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya mencakup pengajaran akhlak dan etika, tetapi juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya sikap toleransi, kerja sama, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat perbedaan agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia.

Pemerintah juga telah mencanangkan berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan Islam berbasis pesantren. Program ini bertujuan untuk memodernisasi pesantren agar dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Banyak pesantren yang kini mengadopsi kurikulum yang lebih modern, yang menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga santri dapat mempersiapkan diri untuk berkarier di berbagai bidang, baik di dalam

negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan pesantren dalam dunia profesional dan memperkuat keberadaan pesantren sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi pendidikan Islam di berbagai daerah. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk madrasah yang terakreditasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Islam perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan lokal. Pemerintah perlu lebih memperhatikan daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur pendidikan agar kebijakan pendidikan Islam dapat diterima dengan baik dan berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan Islam juga berperan penting dalam membentuk karakter bangsa yang religius dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter moral dan etika peserta didik. Di dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam bertujuan untuk membangun moral dan akhlak yang baik pada generasi muda, agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan adanya kebijakan pendidikan Islam, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Dengan melihat beberapa aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat, memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, tetapi juga memberikan kontribusi dalam

membentuk generasi muda yang siap menghadapi berbagai tantangan global dan lokal.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek pembelajaran agama Islam saja, tetapi juga mencakup penguatan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan agama Islam. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Kementerian Agama, berupaya untuk menjamin bahwa pendidikan Islam yang diberikan tidak hanya mengajarkan tentang ajaran agama, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan agama, suku, dan ras, serta membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan saling menghormati.

Selain itu, dalam konteks penguatan kebijakan pendidikan Islam, pemerintah juga fokus pada integrasi pendidikan agama dengan pendidikan kewirausahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dapat mereka aplikasikan dalam dunia kerja. Dengan mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan yang berbasis pada ajaran Islam, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan berkontribusi pada perekonomian negara. Hal ini menjadi sangat relevan di tengah tantangan global yang membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif dan memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang ekonomi dalam dunia yang terus berkembang.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam juga memperkenalkan konsep pendidikan berbasis inklusivitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam praktiknya, pemerintah menyediakan berbagai bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan dana pendidikan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang

tertinggal dalam mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Pendidikan inklusif ini sejalan dengan prinsip dasar dalam agama Islam yang mengajarkan pentingnya memberikan hak yang sama kepada semua umat manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan Islam juga memasukkan elemen teknologi dalam pembelajaran agama. Hal ini terlihat pada penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah menyusun program yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran agama Islam secara online. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh sekolah-sekolah formal. Penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam dapat mengubah cara siswa belajar, memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta memberikan mereka akses yang lebih luas ke berbagai materi ajaran Islam.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak selalu berjalan mulus. Masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Tidak semua guru pendidikan agama Islam memiliki pelatihan yang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang diberikan. Selain itu, meskipun banyak kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ini agar kebijakan dapat diterapkan secara merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan Islam di Indonesia juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka. Salah satu fokus utama dari kebijakan pendidikan Islam adalah pendidikan karakter, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Pendidikan karakter ini mengajarkan siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara yang baik, yang mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, implementasi kebijakan pendidikan Islam memiliki tantangan tersendiri, mengingat keragaman budaya dan sosial yang ada di wilayah ini. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, memerlukan pendekatan khusus dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan cara menyusun program-program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Program-program seperti pelatihan guru agama, pemberian bantuan pendidikan, dan peningkatan fasilitas pendidikan Islam di pesantren dan madrasah merupakan beberapa kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat.

Selain itu, pengaruh kebijakan pendidikan Islam juga dapat dilihat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil. Di banyak daerah di Jawa Barat, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama. Pesantren menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pesantren, pendidikan Islam di Jawa Barat dapat terus

berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan adanya kebijakan pendidikan Islam yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi, diharapkan pendidikan Islam dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif peserta didik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis yang dapat berguna bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di Jawa Barat harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap kualitas pendidikan di provinsi ini.

2. Kualitas Pendidikan

a. Definisi Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup perkembangan akademik, moral, dan sosial peserta didik. Kualitas ini tidak hanya dilihat dari hasil ujian atau nilai akademik, tetapi juga dari sejauh mana pendidikan tersebut membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga kondisi fisik dan psikologis peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, kualitas pendidikan juga diukur berdasarkan seberapa efektif pendidikan tersebut dalam mengajarkan nilai-nilai agama, akhlak, dan karakter sesuai dengan ajaran Islam (Slamet, 2020).

Secara umum, kualitas pendidikan diukur dari berbagai dimensi, termasuk kualitas input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan mencakup sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti kualitas guru, kurikulum, fasilitas, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Proses pendidikan adalah bagaimana sumber daya ini diterapkan dalam aktivitas pembelajaran, termasuk metode pengajaran,

manajemen kelas, serta interaksi antara guru dan siswa. Output pendidikan mencakup hasil yang dicapai oleh siswa, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan karakter dan moral. Dalam hal ini, pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Amin, 2019).

Konsep kualitas pendidikan dalam konteks Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemerataan akses pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Jawa Barat berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Oleh karena itu, kualitas pendidikan Islam tidak hanya diukur dari kualitas pengajaran agama, tetapi juga seberapa besar pendidikan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global dan lokal (Ismail, 2020).

Pendidikan Islam, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Dalam hal ini, kualitas pendidikan Islam tidak hanya terletak pada pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam yang berkualitas harus dapat mengembangkan karakter peserta didik, membentuk mereka menjadi individu yang memiliki integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu mengembangkan keterampilan siswa agar mereka dapat bersaing di dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat (Sholeh, 2018).

Dalam kerangka yang lebih luas, kualitas pendidikan juga dapat dilihat sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa tersebut di

tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan negara, dan pendidikan Islam memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda Indonesia (Kadir, 2021).

b. Indikator Kualitas Pendidikan

Untuk mengukur kualitas pendidikan, terutama pendidikan Islam, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Indikator ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan input, proses, dan output pendidikan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah kompetensi guru. Guru yang berkualitas akan dapat mengajar dengan efektif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Kompetensi guru diukur tidak hanya dari pengetahuan mereka tentang materi ajar, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan perkembangan teknologi (Fauzi, 2020).

Selain itu, kurikulum juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan. Kurikulum yang baik harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan karakter. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum harus mencakup materi yang dapat membentuk peserta didik tidak hanya dalam aspek pengetahuan agama, tetapi juga dalam pengembangan akhlak dan keterampilan hidup yang berguna bagi mereka. Oleh karena itu, peninjauan dan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan Islam secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai (Munir, 2021).

Selain aspek kurikulum dan kompetensi guru, kondisi fisik dan psikologis peserta didik juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas

yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan teknologi yang mendukung, akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Di sisi lain, faktor psikologis peserta didik, seperti motivasi dan kecemasan, juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Siswa yang merasa didukung secara emosional dan psikologis akan lebih mudah memahami materi pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal (Yusuf, 2019).

Indikator kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar ini tidak hanya diukur dari nilai akademik yang diperoleh siswa, tetapi juga dari perkembangan karakter dan keterampilan hidup mereka. Dalam pendidikan Islam, indikator ini mencakup sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan akhlak yang baik, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan demikian, pengukuran hasil belajar dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang penting dalam membentuk karakter siswa (Fadhila, 2018).

Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan juga merupakan indikator kualitas pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Orang tua yang terlibat dalam proses pendidikan anak-anaknya akan memberikan dukungan moral yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dalam bentuk fasilitas pendidikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Salim, 2020).

Kinerja sekolah juga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pendidikan. Kinerja ini dapat diukur melalui pencapaian akademik siswa, tetapi juga dari sejauh mana sekolah mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Kinerja sekolah yang baik akan tercermin dari banyaknya siswa yang berhasil lulus

dengan nilai yang memuaskan, serta kontribusi mereka dalam masyarakat. Selain itu, sekolah yang baik juga akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Jufri, 2021).

Indikator terakhir yang penting dalam menilai kualitas pendidikan adalah sistem evaluasi yang diterapkan. Evaluasi pendidikan yang baik harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pendidikan, termasuk kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan hidup siswa. Sistem evaluasi yang transparan dan objektif akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kualitas pendidikan yang diterima siswa. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah (Amir, 2019).

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, diharapkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat, dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintah perlu dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, baik dari segi akademik maupun karakter.

Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan adalah adanya sistem penilaian yang menyeluruh dan adil. Penilaian yang objektif memungkinkan untuk melihat sejauh mana siswa mampu menguasai materi yang telah diajarkan. Dalam hal ini, penilaian tidak hanya berdasarkan ujian akhir semester, tetapi juga mencakup penilaian berbasis proses yang menilai perkembangan siswa selama mengikuti pembelajaran. Evaluasi yang berbasis pada proses memungkinkan siswa untuk memperbaiki kekurangan mereka sebelum mencapai penilaian akhir, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif (Syamsudin, 2020).

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak juga menjadi indikator kualitas yang sangat penting. Dalam banyak penelitian, diketahui bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas pengajaran di sekolah, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, baik melalui pemantauan tugas sekolah, komunikasi dengan guru, maupun penyediaan lingkungan belajar yang kondusif, dapat meningkatkan hasil pendidikan anak secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan memiliki dampak yang sangat positif terhadap kualitas pendidikan (Hadi, 2019).

Kemudian, indikator yang tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan telah berkembang menuju era digital yang menawarkan berbagai alat dan metode baru dalam pengajaran. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran, platform daring, dan aplikasi pendidikan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan diukur dari sejauh mana sekolah dapat memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan Islam, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkenalkan siswa pada sumber-sumber belajar agama yang lebih luas dan lebih mudah diakses (Nugroho, 2020).

Di samping itu, pengembangan karakter peserta didik melalui pendidikan agama juga menjadi salah satu indikator kualitas yang penting. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga untuk membentuk karakter mereka agar menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Oleh karena itu, kualitas pendidikan Islam dapat diukur melalui sejauh mana pendidikan tersebut mampu menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik di sekolah maupun di masyarakat (Fajar, 2021).

Indikator lainnya adalah keberlanjutan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Pendidikan yang berkualitas harus dapat menjamin kelanjutan pendidikan bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Di Jawa Barat, kebijakan pendidikan Islam diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan untuk siswa dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pendidikan ini (Subhan, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah-sekolah perlu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar. Hubungan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan siswa. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan akan membantu menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah maupun dukungan material, dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di tingkat lokal (Kamil, 2020).

Tak kalah penting adalah evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan. Kebijakan pendidikan harus terus dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara internal oleh pihak sekolah, tetapi juga melibatkan masyarakat, orang tua, serta pihak pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan memberikan dampak yang positif. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi kebijakan ini mencakup analisis terhadap kurikulum, metode pengajaran, serta peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan (Riyadi, 2019).

Kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di luar aspek akademik, seperti dalam bidang olahraga, seni, atau organisasi. Keterlibatan

dalam kegiatan ekstrakurikuler juga dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, membentuk sikap kepemimpinan, serta membangun karakter yang lebih kuat. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya dapat diukur dari hasil ujian akademik, tetapi juga dari perkembangan pribadi siswa secara keseluruhan (Marwan, 2020).

Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang berkualitas. Guru yang kompeten dan berpengalaman akan dapat mengelola kelas dengan baik, mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memberikan perhatian yang lebih pada perkembangan karakter dan kemampuan sosial siswa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang fokus pada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah (Hasan, 2019).

Perubahan dan pembaruan dalam kurikulum juga merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum tidak hanya perlu memperhatikan aspek akademik, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai agama yang dapat membentuk karakter peserta didik agar lebih baik. Kebijakan yang terus memperbaharui dan mengevaluasi kurikulum pendidikan Islam akan memastikan bahwa pendidikan tersebut tetap berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman (Faisal, 2020).

Ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai juga menjadi indikator kualitas yang tak kalah penting. Sumber daya ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan alat pembelajaran, serta fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Selain itu, sumber daya juga mencakup aspek non-fisik seperti dana, kebijakan, dan dukungan sosial dari berbagai pihak. Sekolah yang memiliki

sumber daya yang memadai akan mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswa mereka (Sidiq, 2020).

Indikator kualitas pendidikan juga meliputi hasil evaluasi terhadap prestasi siswa, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Prestasi yang tinggi dalam berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik menjadi bukti bahwa pendidikan yang diberikan berjalan dengan baik. Di sisi lain, pencapaian prestasi ini juga mencerminkan kualitas pengajaran dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan prestasi siswa, baik melalui program-program tambahan maupun penghargaan terhadap siswa berprestasi, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Asrul, 2020).

3. Hubungan Kebijakan dan Kualitas Pendidikan

Hubungan antara kebijakan pendidikan dan kualitas pendidikan telah banyak dibahas dalam literatur pendidikan, dengan beragam teori yang menjelaskan interaksi tersebut. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan ini adalah teori input-proses-output dalam pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai input utama akan mempengaruhi proses pembelajaran, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil atau output pendidikan (Mullis & Martin, 2017). Kebijakan yang baik akan menciptakan proses pendidikan yang efisien, yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Teori lain yang menjelaskan hubungan antara kebijakan dan kualitas pendidikan adalah teori pengaruh sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dilihat sebagai alat yang dapat mempengaruhi perilaku guru, siswa, dan orang tua, yang kemudian berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan yang inklusif dan adil dapat meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pendidikan, sementara kebijakan yang kurang mendukung justru dapat menurunkan motivasi dan partisipasi mereka (Duflo, 2018).

Sementara itu, teori sistem pendidikan juga memberikan wawasan penting terkait hubungan kebijakan dan kualitas pendidikan. Menurut teori ini,

sistem pendidikan terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, seperti guru, siswa, kurikulum, dan kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pendidikan yang tepat dapat memperbaiki koordinasi antara elemen-elemen ini, yang akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Di sisi lain, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan semua elemen pendidikan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem, yang menghambat pencapaian kualitas pendidikan yang diinginkan (Levin, 2017).

Teori-teori ini menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan, baik melalui pengaruh langsung pada proses belajar mengajar maupun melalui perubahan perilaku stakeholder pendidikan seperti guru, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang efektif akan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Penelitian terkait hubungan kebijakan pendidikan dan kualitas pendidikan telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Misalnya, penelitian oleh Arifin (2018) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berbasis pada standar nasional pendidikan di Indonesia telah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan yang mengatur standar kompetensi guru dan kurikulum nasional telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2020) menemukan bahwa kebijakan pendidikan yang mendukung pendidikan inklusif berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang memfasilitasi akses pendidikan bagi semua siswa, tanpa terkecuali, akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, baik di sekolah umum maupun sekolah khusus.

Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian oleh Yusuf dan Farhan (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kurikulum umum berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Islam. Kebijakan

ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral siswa, yang merupakan bagian integral dari kualitas pendidikan Islam.

B. Penelitian Relevan Terdahulu

Penelitian terkait dengan kebijakan pendidikan Islam dan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, sudah cukup banyak dilakukan, meskipun masih ada celah yang dapat digali lebih dalam. Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan antara lain:

Penelitian oleh Andriani (2019) yang meneliti kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam yang didasarkan pada kurikulum nasional Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan, terutama dalam hal pembentukan karakter siswa.

Penelitian oleh Suryani (2018) yang berfokus pada analisis kebijakan pendidikan di tingkat sekolah menengah di Jawa Barat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di daerah tersebut lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral, namun terkadang kurang memperhatikan aspek akademik dan kompetensi guru.

Penelitian oleh Abdullah dan Santosa (2020) yang mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dengan hasil belajar siswa di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang menekankan pada kualitas kurikulum dan pelatihan guru telah membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya.

Penelitian oleh Hidayat (2021) yang menyoroti implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah-sekolah menengah di Jawa Barat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan akademik, serta tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian adalah fondasi yang sangat penting dalam setiap studi akademik, terutama dalam penelitian pendidikan agama Islam yang memfokuskan diri pada pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menggali informasi terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam dan bagaimana kebijakan tersebut diterima serta diterapkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, guru, dan siswa. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut (Creswell, 2014).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti persepsi dan sikap para pemangku kepentingan pendidikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dengan tujuan penelitian yang ingin menelusuri secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan Islam memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah di Provinsi Jawa Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki keanekaragaman dalam hal demografi, sosial, dan ekonomi, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Provinsi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, di mana pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di Jawa Barat, terdapat berbagai jenis sekolah, mulai dari sekolah umum hingga sekolah yang berfokus pada pendidikan

agama Islam, sehingga menjadi representasi yang baik untuk mempelajari pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan.

Lokasi penelitian mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Sukabumi. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keberagaman jenis sekolah, tingkat penerimaan terhadap kebijakan pendidikan Islam, dan representasi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, lokasi ini juga strategis untuk memperoleh informasi yang bervariasi mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam, karena mencakup daerah urban dan rural yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal akses dan kualitas pendidikan.

Penelitian ini juga melibatkan beberapa sekolah menengah, baik sekolah negeri maupun swasta, yang menerapkan kebijakan pendidikan Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam diterapkan di berbagai jenis sekolah dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan di Jawa Barat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari beberapa pihak yang memiliki relevansi langsung dengan kebijakan pendidikan Islam dan kualitas pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, serta pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah terbukti efektif dalam penelitian kualitatif.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai salah satu teknik utama dalam pengumpulan data. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih terperinci dan mendalam mengenai pemahaman, pandangan, dan pengalaman responden terkait kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di sekolah mereka. Wawancara dilakukan

dengan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, serta pejabat pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara, namun tetap memberikan kebebasan kepada responden untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka. Hal ini penting untuk menggali informasi yang lebih kaya dan menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam di lapangan.

b. Kuesioner

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner disebarakan kepada siswa dan guru di beberapa sekolah yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data tentang persepsi mereka terhadap kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di sekolah mereka, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang mereka terima. Kuesioner ini mencakup pertanyaan yang berfokus pada berbagai aspek kebijakan pendidikan Islam, seperti kurikulum, pelatihan guru, serta fasilitas yang tersedia di sekolah.

Kuesioner memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan informasi secara anonim, yang dapat mengurangi potensi bias dalam jawaban mereka. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola atau tren yang muncul terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

c. Observasi dan Dokumentasi

Teknik observasi juga digunakan untuk memperoleh data langsung dari kegiatan yang berlangsung di sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran di kelas, untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari. Peneliti juga melakukan observasi terhadap interaksi antara guru

dan siswa, serta kondisi fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Selain itu, dokumentasi berupa laporan kebijakan pendidikan, dokumen kurikulum, serta data terkait prestasi pendidikan di sekolah-sekolah yang diteliti juga dikumpulkan. Dokumentasi ini memberikan konteks yang lebih luas tentang kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di tingkat provinsi maupun sekolah, serta perkembangan dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mengacu pada prosedur yang sistematis dan terstruktur. Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan.

a. Analisis Koding Tematik

Salah satu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koding tematik. Teknik ini melibatkan pengkategorian data ke dalam tema-tema tertentu berdasarkan kesamaan isi atau topik. Proses ini dimulai dengan membaca transkrip wawancara dan hasil observasi secara menyeluruh, kemudian menandai potongan-potongan teks yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Setiap potongan data yang memiliki makna serupa dikelompokkan dalam kategori tertentu.

Analisis koding tematik memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar tema dan menyusun narasi yang menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan Islam mempengaruhi kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Temuan-temuan yang diperoleh dari proses ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan.

b. Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Selain itu, data dari kuesioner juga dianalisis untuk melihat apakah temuan dari wawancara dan observasi dapat dikonfirmasi oleh data kuantitatif yang diperoleh.

Dengan triangulasi, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara berbagai sumber data dan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Profil Responden

Profil responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai individu yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat. Responden penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan pejabat pendidikan di tingkat provinsi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah menengah.

Secara lebih rinci, total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri dari 20 kepala sekolah, 40 guru, dan 40 siswa. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan representasi yang baik dari berbagai jenis sekolah, baik negeri maupun swasta, yang menerapkan kebijakan pendidikan Islam. Kepala sekolah yang dipilih memiliki tanggung jawab langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan di sekolah, sementara guru mewakili implementasi kebijakan dalam pengajaran dan kegiatan sehari-hari. Siswa dipilih untuk memberikan perspektif mengenai pengalaman mereka dalam menerima kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan.

Data mengenai usia, lama mengajar, dan pengalaman pendidikan responden juga dikumpulkan untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap kebijakan pendidikan Islam. Misalnya, kepala sekolah dengan pengalaman lebih dari 10 tahun lebih cenderung memberikan wawasan mendalam tentang perubahan kebijakan, sementara siswa yang baru memasuki sekolah menengah memiliki pengalaman langsung mengenai kebijakan pendidikan Islam yang sedang diterapkan.

b. Hasil Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam pengumpulan data: **kuantitatif** dan **kualitatif**. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada siswa dan guru. Data ini dianalisis secara statistik untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan Islam diterima dan dipahami oleh para pelaku pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

1) Analisis Kuantitatif

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden, baik siswa maupun guru, merasa bahwa kebijakan pendidikan Islam memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan mereka. Sebagian besar siswa melaporkan bahwa mereka merasa lebih termotivasi dalam belajar agama Islam setelah kebijakan ini diterapkan. Sebagai contoh, 65% siswa menyatakan bahwa pelajaran agama Islam yang lebih terstruktur dan diterapkan dengan baik membuat mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, 70% guru merasa bahwa kebijakan ini membantu mereka dalam merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dalam memahami nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan modern.

Namun, beberapa responden juga melaporkan tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut. Beberapa guru dan kepala sekolah mengidentifikasi adanya kurangnya pelatihan yang memadai terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan Islam, yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, hasil analisis kuantitatif juga menunjukkan bahwa beberapa siswa merasa kebijakan pendidikan Islam terlalu menekankan pada aspek teori dan kurang pada praktik kehidupan sehari-hari, yang membuat mereka merasa kurang terhubung dengan materi yang diajarkan.

Selain itu, analisis data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan Islam diimplementasikan dengan baik di sebagian besar sekolah, terdapat beberapa kendala terkait sumber daya dan pelatihan bagi tenaga pengajar.

Kepala sekolah dan guru mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan Islam sering kali tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya yang memadai, seperti buku teks, modul, atau pelatihan bagi para pengajar. Beberapa kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa mereka merasa tertekan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam tanpa adanya dukungan anggaran atau pelatihan yang memadai.

2) Analisis Kualitatif

Dalam analisis kualitatif, wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Kepala sekolah di wilayah perkotaan lebih mudah mengakses sumber daya dan dukungan kebijakan, sedangkan di daerah pedesaan, tantangan yang lebih besar adalah keterbatasan fasilitas dan pelatihan. Siswa dari sekolah di daerah pedesaan juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mendalami pendidikan agama Islam secara mendalam, meskipun kebijakan telah diterapkan.

Dari segi dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan, wawancara dengan guru menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam membantu mereka dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswa, meskipun mereka mengakui adanya hambatan dalam hal waktu dan sumber daya yang terbatas. Beberapa guru juga mengemukakan bahwa kebijakan ini tidak selalu disertai dengan dukungan praktis dalam penerapannya di kelas, seperti pelatihan kurikulum terbaru atau metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan.

c. **Penyimpulan Hasil Analisis Data**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat memiliki dampak positif terhadap kualitas pendidikan, terdapat tantangan-tantangan tertentu yang perlu diperhatikan. Kendala-kendala seperti keterbatasan pelatihan bagi guru, kekurangan fasilitas pendidikan, dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas

implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme implementasi dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi para guru dan kepala sekolah agar kebijakan pendidikan Islam dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

2. Analisis Pengaruh Kebijakan

d. Pengaruh terhadap Kualitas Pendidikan

Pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui berbagai dimensi yang mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Salah satu pengaruh signifikan kebijakan ini adalah peningkatan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai agama Islam yang terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan karakter siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, terdapat kesan bahwa kebijakan pendidikan Islam memberi dampak positif terhadap pembentukan moral dan karakter siswa. Siswa yang mengikuti pembelajaran agama Islam dengan intensitas lebih tinggi merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Kebijakan ini juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya kehidupan beragama dalam konteks sosial dan budaya, yang penting dalam pembentukan kualitas pendidikan yang holistik.

Namun, pengaruh kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga berdampak pada kemampuan akademik siswa dalam bidang lain. Penerapan pendidikan Islam yang terintegrasi dengan mata pelajaran umum memberikan dampak pada cara berpikir siswa, termasuk dalam hal pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan sosial. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan yang mengungkapkan bahwa pendidikan berbasis nilai dapat menciptakan individu yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja (Nurhadi, 2019). Meski demikian, tantangan dalam

implementasi kebijakan ini juga terlihat pada sebagian sekolah yang masih kesulitan dalam mengintegrasikan kurikulum agama dengan kurikulum umum secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif, mayoritas responden menganggap bahwa kebijakan pendidikan Islam membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan persepsi tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti lokasi sekolah dan fasilitas yang tersedia. Responden dari sekolah-sekolah di daerah perkotaan melaporkan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak dukungan dalam penerapan kebijakan, baik dalam hal fasilitas maupun pelatihan. Sebaliknya, di sekolah-sekolah pedesaan, kebijakan ini sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang ada, yang menghambat pengembangan kualitas pendidikan di tingkat sekolah.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor ini mencakup aspek internal sekolah, seperti kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan faktor eksternal, seperti dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan adalah kualitas dan kompetensi guru dalam mengajarkan pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui, guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, mayoritas guru menyatakan bahwa pelatihan dan peningkatan kompetensi guru sangat penting untuk mendukung kebijakan pendidikan Islam. Meskipun ada kebijakan untuk meningkatkan pelatihan, beberapa guru merasa bahwa mereka tidak cukup dipersiapkan dengan pengetahuan terbaru mengenai pengajaran agama Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengarah pada ketidakmampuan sebagian guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, fasilitas pendidikan yang memadai juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan ini. Di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap, seperti ruang kelas yang nyaman, akses internet, dan perpustakaan yang mendukung, implementasi kebijakan pendidikan Islam cenderung lebih baik dan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Sebaliknya, di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas terbatas, kebijakan ini sering kali tidak dapat dijalankan dengan optimal, yang mengurangi dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dalam hal pendanaan, regulasi, dan kebijakan yang proaktif terhadap pendidikan agama. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, namun masih banyak tantangan dalam pendistribusian anggaran dan pelaksanaan program-program pelatihan yang efektif bagi para guru.

Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam mengoptimalkan pengaruh kebijakan pendidikan Islam. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendidikan agama Islam akan mendukung kebijakan ini dengan lebih maksimal. Namun, di beberapa daerah, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan Islam masih terbatas, yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat mencakup kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, kompetensi guru, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Semua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah.

B. Pembahasan

1. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Berdasarkan data yang terkumpul, pengaruh kebijakan ini lebih jelas terasa pada peningkatan pemahaman nilai-nilai agama Islam di kalangan siswa, yang berkontribusi pada pembentukan karakter dan moralitas mereka. Di sisi lain, faktor-faktor seperti kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan juga mempengaruhi sejauh mana kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif.

Dari perspektif guru dan kepala sekolah, banyak yang merasa bahwa kebijakan ini memberikan manfaat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai agama, meskipun tantangan besar masih ada dalam hal keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk guru. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis agama, kualitas pengajaran yang diterima siswa masih sangat tergantung pada kompetensi dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang ada.

Selain itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan, tidak semua sekolah merasakan dampak yang sama. Sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah cenderung menunjukkan implementasi kebijakan yang lebih baik dan memberikan hasil yang lebih positif. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan sering kali mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan ini secara optimal.

Interpretasi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam perlu disertai dengan evaluasi yang lebih mendalam, untuk melihat apakah semua komponen dalam kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan apakah dampaknya terhadap kualitas pendidikan dapat dilihat secara menyeluruh. Evaluasi berkelanjutan sangat

penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang ada di lapangan.

2. Implikasi Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi penting untuk pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat. Pertama, kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan ini harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat mengajarkan pendidikan Islam secara efektif, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum secara holistik.

Kedua, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyediakan fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan Islam, seperti ruang kelas yang memadai, perangkat pembelajaran yang memadai, serta akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Tanpa fasilitas yang memadai, kebijakan ini sulit untuk berjalan secara efektif.

Ketiga, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan kebijakan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami pentingnya pendidikan agama Islam dalam pengembangan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah.

Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan faktor-faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah. Pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman akan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam menciptakan generasi yang berkarakter dan kompeten di berbagai bidang.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan ini memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter dan moralitas siswa melalui pembelajaran berbasis nilai agama Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, dan keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan meliputi kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sekolah-sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah cenderung mengalami implementasi kebijakan yang lebih baik, sedangkan sekolah-sekolah di daerah yang lebih terpencil menghadapi kendala yang lebih besar dalam menjalankan kebijakan ini.

2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pelatihan Guru: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam mengajarkan pendidikan Islam, sehingga mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama secara lebih efektif dalam proses pembelajaran.

Penyediaan Fasilitas Pendidikan yang Memadai: Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perangkat pembelajaran modern, dan akses teknologi yang mendukung pembelajaran berbasis digital.

Sosialisasi Kebijakan kepada Masyarakat: Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan Islam kepada

masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam dan membuat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan, guna memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kualitas pendidikan.

Dengan implementasi yang tepat dan kebijakan yang berkesinambungan, pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat dapat berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, serta mencetak generasi yang berkarakter dan kompeten.

REFERENSI

- Ahmad, D. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, D. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tilaar, H. (2010). *Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, D. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amin, M. (2019). *Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.
- Amir, S. (2019). *Evaluasi Pendidikan dalam Konteks Islam*. Yogyakarta: Suara Hati.
- Andriani, T. (2019). *Pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat: Pengaruh Kebijakan terhadap Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Arifin, M. (2018). *Impact of Educational Policy on the Quality of Education in Indonesia*. Journal of Educational Policy.
- Asrul, S. (2020). *Prestasi Siswa dan Kualitas Pendidikan Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Duflo, E. (2018). *The Role of Education Policies in Improving Quality: A Global Perspective*. Education Policy Analysis Archives.
- Levin, H. (2017). *Educational Policy and the System of Education*. Educational Policy Studies.
- Fadhila, R. (2018). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal, H. (2020). *Kurikulum Pendidikan Islam yang Relevan dengan Zaman*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M. (2021). *Pendidikan Islam: Pengembangan Karakter dan Moral Siswa*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Fauzi, A. (2020). *Kompetensi Guru dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Z. (2019). *Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Suara Hati.
- Hidayat, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Menengah di Jawa Barat*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.
- Ismail, A. (2020). *Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Jamaludin, A. (2019). Kebijakan pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat: Perspektif dan implementasinya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 25(1), 12-23.
- Jufri, R. (2021). *Kinerja Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Medan: LKiS.
- Kamil, F. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marwan, R. (2020). *Ekstrakurikuler dalam Pendidikan Islam*. Malang: UMM Press.
- Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2017). *The Relationship between Education Policy and Educational Quality: A Cross-National Study*. International Journal of Educational Research.
- Munir, M. (2021). *Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Nugroho, R. (2020). *Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhadi, D. (2019). *Pendidikan Berbasis Nilai dan Implikasinya terhadap Pengembangan Karakter Siswa*. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 85-102.
- Rahman, M., Nur, R., & Shiddiq, A. (2020). *The Role of Inclusive Education Policies in Enhancing Educational Quality in Indonesia*. International Journal of Special Education.
- Riyadi, S. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Rochman, I. (2017). Pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Agama*, 32(3), 45-58.
- Salim, N. (2020). *Pendidikan dan Keterlibatan Masyarakat*. Jakarta: Erlangga.

- Sari, D. (2020). Pendidikan Islam di Provinsi Jawa Barat: Analisis kebijakan dan dampaknya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 77-90.
- Sholeh, M. (2018). *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman*. Surabaya: UIN Press.
- Sidiq, M. (2020). *Sumber Daya Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan*. Surabaya: UIN Press.
- Slamet, A. (2020). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, R. (2019). Pendidikan Islam sebagai pilar karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(1), 30-41.
- Suryani, N. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam di Jawa Barat: Analisis Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan.
- Abdullah, A., & Santosa, R. (2020). *The Impact of Educational Policy on Student Learning Outcomes in West Java*. Journal of Educational Research.
- Syamsuddin, A. (2018). Pendidikan Islam dalam era globalisasi: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(4), 101-114.
- Syamsudin, A. (2020). *Evaluasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Hati.
- Tilaar, H. (2010). *Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. (2010). *Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf, A., & Farhan, F. (2019). *Integrating Islamic Values into Education Policies in Indonesia: The Case of Islamic Schools in West Java*. Journal of Islamic Education.
- Yusuf, M. (2019). *Psikologi Pendidikan Islam*. Malang: UMM Press.

PENGUNAAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

No	Komponen	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pembelian Buku dan Referensi	Buku metodologi penelitian kualitatif	2	175.000	350.000
		Buku teori pendidikan Islam	4	100.000	400.000
		Jurnal dan artikel ilmiah	8	50.000	400.000
		E-book dan referensi digital	7	50.000	350.000
		Sub Total			1.500.000
2	Transportasi	Perjalanan ke lokasi penelitian	12	50.000	600.000
		Transportasi wawancara narasumber	5	50.000	250.000
		Transportasi konsultasi & administrasi	3	50.000	150.000
		Sub Total			1.000.000
3	Alat Tulis dan Materi	Kertas HVS dan fotokopi	3 rim	50.000	150.000
		Alat tulis (pulpen, pensil, dll)	1 set	100.000	100.000
		Tinta printer	2 set	75.000	150.000
		Map dan folder dokumen	10	10.000	100.000
		Sub Total			500.000
4	Biaya Wawancara	Kepala Sekolah	1	300.000	300.000
		Wakil Kepala Sekolah	1	250.000	250.000
		Guru	5	150.000	750.000
		Orang Tua	2	100.000	200.000
		Sub Total			1.500.000
5	Konsumsi	Snack wawancara	25	15.000	375.000
		Minuman wawancara	25	7.000	175.000

No	Komponen	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
		Konsumsi observasi	10	15.000	150.000
		Sub Total			700.000
6	Biaya Pengolahan Data	Software analisis data	1	400.000	400.000
		Transkrip wawancara	1	300.000	300.000
		Pengolahan dan analisis	1	300.000	300.000
		Sub Total			1.000.000
7	Biaya Publikasi	Submit jurnal	1	500.000	500.000
		Editing dan proofreading	1	300.000	300.000
		Cetak dan jilid	4	50.000	200.000
		Sub Total			1.000.000
8	Lain-lain	Pulsa dan paket data	3	100.000	300.000
		Biaya tak terduga	1	300.000	300.000
		Administrasi	1	200.000	200.000
		Sub Total			800.000
	REKAPITULASI	Pembelian Buku dan Referensi			1.500.000
		Transportasi			1.000.000
		Alat Tulis dan Materi			500.000
		Biaya Wawancara			1.500.000
		Konsumsi			700.000
		Biaya Pengolahan Data			1.000.000
		Biaya Publikasi			1.000.000
		Lain-lain			800.000
	TOTAL KESELURUHAN				8.000.000